

**SIKAP PENYELENGGARA SIARAN TELEVISI
TERHADAP PENYELENGGARAAN SIARAN TELEVISI DIGITAL**

***TELEVISION BROADCASTER ATTITUDE TOWARD DIGITAL TELEVISION
BROADCASTING***

Bambang Mudjiyanto

Peneliti pada BPPKI Jakarta Balitbang SDM KemKominfo,
Jln. Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat

(Naskah diterima 2 Oktober 2013, diperiksa mitra bestari November 2013, direvisi Desember 2013,
disetujui terbit Desember 2013)

ABSTRACT

Based on variation of attitude phenomenon regarding the implementation phases of digital television in Indonesia, this study concerned about broadcaster's attitude towards implementation of the digital television broadcasting. By surveying 100 respondents, this research found that respondents' attitude are likely to agree on four of five dimensions : constraints of digital television broadcasting, potential implementation of digital television broadcasting, direction of digital television broadcasting, and the implementation of digital television broadcasting. While more respondents' attitude related public and industry readiness migration to digital dimension are neutral.

Keywords :Attitude;TV Digital Broadcasting.

ABSTRAK

Berlatar belakang fenomena variasi sikap berbagai pihak menyangkut penerapan fase-fase penyelenggaraan tv digital di Indonesia, penelitian ini mempermasalahkan sikap penyelenggara siaran televisi terhadap penyelenggaraan siaran televisi digital. Melalui survai 100 responden penelitian ini menemukan bahwa dari lima dimensi sikap menyangkut penyelenggaraan siaran televisi digital, sikap responden cenderung lebih banyak setuju pada empat dimensi, yaitu dimensi : kendala penyelenggaraan penyiaran televisi digital; potensi penyelenggaraan siaran televisi digital; arah penyelenggaraan penyiaran siaran televisi digital bergerak; dan penyelenggaraan siaran televisi digital; Sementara sikap terkait dimensi 'kesiapan masyarakat dan industri menghadapi migrasi analog ke digital' responden lebih banyak bersikap netral.

Kata-kata kunci : Sikap; siaran televisi digital.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Digitalisasi TV adalah tuntutan perkembangan teknologi, yang dilakukan semua negara di dunia. Digitalisasi TV berkaitan dengan kemajuan teknologi, tuntutan kebutuhan masyarakat hingga tuntutan *green economy*. Dewasa ini 85% wilayah dunia telah mengimplementasikan digitalisasi penyiaran. *International Telecommunication Union* (ITU) telah tetapkan kesepakatan tahun 2015 sebagai batas akhir TV Analog secara internasional. USA misalnya telah *switch off* analog 2009, Jepang 2011, Korea Cina & UK 2012, Brunei 2014, Singapura, Malaysia, Thailand & Filipina 2015. Indonesia berencana *swicth off* 2018 (Subiakto, 2013).

Secara global kita sudah terlambat di banding negara tetangga. Apalagi kalau mau mengikuti pihak pihak pengritik selama ini, akan makin terlambat lagi. Padahal kalau terlambat akibatnya Indonesia akan mengalami kerugian. Karena dengan mempertahankan sistem analog, maka itu menjadi tidak efisien, menghabiskan frekuensi, boros listrik, kualitas gambar dan suara tidak bagus, dan pengembangan *broadband* berbasis internet juga terhambat. Kalau kita tidak segera digitalisasi, Indonesia terisolir, semua pabrikan tidak lagi produksi TV, pemancar, hingga kontent Analog. Sehingga Analog menjadi langka (Subiakto, 2013, <http://henrysubiakto.blogspot.com/2013/06/digitilisasi-televisi.htm>). dan akibatnya masyarakat Indonesia yang cenderung masih akrab dengan tv analog menjadi kesulitan sendiri dalam mengakses siaran tv.

Melalui perkembangan televisi siaran dengan sistem teknologi digital, di satu sisi sebenarnya banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat sebagai penerima siaran televisi siaran.

Menurut Subiakto (2013), dengan TV digital, gambar lebih jernih, bersih, bahkan kalau di mobilpun tidak terganggu. Salurannya juga lebih banyak. Perangkat TV digital lebih irit listrik, baik untuk tv di rumah maupun stasiun dan pemancar, sesuai dengan green economy. Kalau tv analog, satu frekuensi untuk satu lembaga penyiaran, TV Digital 1 frekuensi bisa untuk 12 saluran TV. Sehingga jumlah TV lebih banyak.

Namun pada sisi ini pula, mereka masih cenderung belum siap menerima kehadiran teknologi ini mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia masih memiliki televisi penerima dengan sistem analog. Dalam penerapan teknologi itu, anggota masyarakat harus menggantinya ke pesawat televisi yang berperangkat sistem digital. Atau setidaknya mereka perlu melakukan penambahan *set top box* (STB) sebagai *converter* televisi analog ke televisi digital. Tentu ini menjadi persoalan tersendiri bagi anggota masyarakat pengguna.

Meskipun tv digital dalam praktiknya sebenarnya banyak memberikan keuntungan, namun dari segi penyelenggaraan dianggap masih belum mendesak untuk dilaksanakan. Karena itu, rencana pengaplikasian tivi digital banyak menuai penolakan. Anggapan tadi diantaranya terutama muncul karena alasan dasar hukum penyelenggaraan TV digital. Menurut kalangan legislatif penyelenggaraan tv digital sebagai suatu yang salah dan mendesak agar penyelenggaraannya menunggu lahirnya UU Penyiaran yang baru. (Subiakto, 2013). Namun menurut Subiakto (2013) dasar hukumnya sudah sangat kuat. Menurutnya ada empat dasar hukum penyelenggaraan siaran digital, pertama adalah: UU Penyiaran, yaitu ada di penjelasan. Dalam penjelasan disebutkan, UU ini disusun berdasarkan pokok pikiran mengantisipasi perkembangabng teknologi, seperti tekhnologi digital. Artinya teknologi digital sudah diantisipasi. Dasar hukum kedua, adalah PP 11/2005 pasal 13 ayat 1: penyelenggaraan (4) penyiaran TV analog atau Digital (5) multiplexing. Ayat 3 akan diatur dengan Peraturan Menteri. Dasar hukum ketiga, PP 50/2005 Penyelenggaraan Lembaga penyiaran swasta (LPS) pasal 2 ayat 1: (4) pnyiaran Tv analog atau Digital (5) multiplexing. Ayat 3 akan diatur dengan Peraturan Menteri. Dasar hukum k4, PP 51/2005 Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) pasal 2 ayat 1 penyiaran Tv analog atau Digital, multiplexing. Ayat 3 akan diatur dengan Peraturan Menteri. Jadi ada 4 dasar hukum bagi munculnya Permen tentang Digitalisasi TV (Misalnya Permen no 22 tahun 2011 dan Permen no 23 tahun 2011), satu di Penjelasan UU Penyiaran dan 3 di PP no 11, 50 dan 51 tahun 2005. Ketiga PP itu dengan tegas menyebut akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Sementara menurut pihak KPI, dasar hukum bagi penyelenggaraan tv digital di Indonesia sebagai cacat hukum. "KPI menyatakan, kebijakan yang ditetapkan pemerintah khususnya Kemenkominfo terkait televisi (TV) digital adalah cacat hukum. Judhariksawan Komisioner Badan Infrastruktur dan Perizinan KPI Pusat menuturkan, seluruh Kepmen yang ditetapkan terkait migrasi dari TV analog menuju era TV digital cacat hukum karena tidak sesuai dengan Undang-Undang (UU) Penyiaran." (KPI, dalam <http://industri.kontan.co.id/news/>, 2913).

Dari latar belakang di atas, kiranya memperlihatkan adanya keragaman sikap dari berbagai pihak menyangkut penerapan fase-fase penyelenggaraan tv digital di Indonesia. Secara teoritis, adanya perbedaan sikap tersebut sebenarnya sebagai sesuatu yang wajar. Salah satu teori yang menjelaskan fenomena sikap tersebut adalah Mushafir Sherif. Menurut Sherif, dalam diri manusia memang terdapat suatu wilayah sikap yang isinya memuat tiga kemungkinan menyangkut sikap, yaitu : menerima, netral dan menolak. Jadi fenomena sikap tentang digitalisasi televisi sebelumnya, kiranya memang relevan dengan apa yang diasumsikan oleh teori sikap Sheriff.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dimaksud, penelitian ini bermaksud untuk memepelajari lebih jauh menyangkut sikap masyarakat, khususnya pada kalangan penyelenggara televisi di DKI Jakarta, tentang digitalisasi televisi tadi. Untuk kepentingan tersebut, penelitian ini merumuskan masalah penelitiannya menjadi sbb.: Bagaimana sikap penyelenggara siaran televisi terhadap penyelenggaraan siaran televisi digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kesiapan penyelenggara siaran televisi digital khususnya di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi pihak pengambil kebijakan sebagai bahan regulator terkait penyiaran televisi digital. Bagi pihak penyelenggara siaran televisi pemerintah maupun swasta diharapkan bisa menjadi bahan masukan dalam kaitan rencana melakukan migrasi teknologi penyiaran analog ke digital.

PEMBAHASAN

Televisi Digital

Dalam ICT *White Paper* 2011, kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi solusi dan kelebihan penyiaran digital dibanding sistem penyiaran analog. Diantaranya pemanfaatan spektrum menjadi lebih optimal, gambar dan suara dengan kualitas jauh lebih baik dan prima, tahan terhadap gangguan interferensi, dan memberikan peluang bagi munculnya industri/bisnis baru baik dibidang telekomunikasi, media elektronik maupun diindustri peralatan dan software.

Terdapat 4 standar besar yang menjadi arah standar dalam dunia *broadcasting* yakni standar DVB (*Digital Video Broadcasting*) TV digital via satelit yang dianut oleh negara-negara Eropa; standar ATSC yang dianut oleh USA; standar ISDB yang merupakan standar siaran TV digital yang berasal dari Jepang dan diadopsi oleh Brazil, serta standar DMB dari Korea Selatan. Saat ini hampir 50% lebih negara-negara di dunia mulai beralih atau mulai mengkaji peralihan sistem penyiaran di negaranya menuju penyiaran digital (Kominfo, 2012). Sementara itu lebih dari 100 negara sudah menetapkan standar penyiaran TV digitalnya menggunakan standar DVB-T termasuk Indonesia. Untuk Indonesia, telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Penetapan Standar Penyiaran Digital Terrestrial untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No.39 Per/M.Kominfo/10/2009 tentang Kerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*), bahwa Indonesia menggunakan standar DVB-T untuk penyiaran *free-to-air* secara terrestrial.

Perkembangan Televisi Digital di Indonesia

Konferensi NAB (*National American Broadcasting*) adalah pertemuan tahunan para *broadcaster* Amerika, yang diikuti juga oleh ribuan *broadcaster* dunia. Pada pertemuan itu digelar pameran besar peralatan *broadcaster* dari pabrik industri radio dan televisi seluruh dunia. Pameran tersebut menggelar "*integrated digital technology system*". Teknologi digital terintegrasi radio maupun televisi, mulai dari *production line*, transmiter hingga pesawat televisi. Pameran ini sekaligus merupakan proklamasi dari para industri bahwa mereka telah siap dengan teknologi digital mulai dari produksi di studio hingga ke pesawat televisi. Ini sekaligus mencanangkan peralihan dari sistem analog ke digital (Balitbang SDM Kominfo dan Galih Karsa Utama, 2005: 27).

Migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital menjadi tuntutan teknologi secara internasional. Penyiaran digital merupakan era yang harus dilayani setiap negara. Lantaran perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meniscayakan hal itu. "Setiap negara memiliki pilihan masing-masing, jangka waktunya adalah hak masing-masing, namun tidak mungkin terlalu lama untuk tidak memasuki era digital", kata Tifatul Sembiring. Hampir lebih dari 85 persen wilayah dunia sudah mulai mengimplementasikan televisi digital. Amerika Serikat telah menerapkan televisi digital sejak Juni 2009, Jepang pada Juli 2011, Korea Selatan dan RRC (China) serta Inggris Raya mengaplikasikan televisi digital 2012. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia termasuk negara yang keenam dalam rencana penerapan siaran televisi digital. Brunei Darussalam akan menerapkan pada Juni 2014, Malaysia Desember 2015. Sementara Singapura, Thailand dan Filipina serentak pada 2015. "Indonesia baru bisa menerapkan televisi digital secara penuh pada 2018. Disusul Vietnam pada 2020", kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring, di Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Kesiapan Televisi Digital di Indonesia

Tahun 2006, beberapa pelaku bisnis pertelevisian Indonesia melakukan uji coba siaran televisi digital. PT Super Save Elektronik melakukan uji coba siaran digital bulan April-Mei 2006 di saluran 27 UHF dengan format DMB-T (China) sementara TVRI/RCTI melaksanakan uji coba siaran digital bulan Juli-Oktober 2006 di saluran 34 UHF dengan format DVB-T. Stasiun-stasiun televisi swasta memanfaatkan teknologi digital pada sistem penyiaran terutama pada sistem perangkat studio untuk memproduksi, mengedit, merekam, dan menyimpan program. Sementara itu penyelenggara televisi digital memanfaatkan spektrum dalam jumlah besar, dimana menggunakan lebih dari satu kanal transmisi. Penyelenggara berperan sebagai operator jaringan dengan mentransmisikan program stasiun televisi lain secara terrestrial menjadi satu paket layanan. Pengirim sinyal gambar, suara, dan data oleh penyelenggara televisi digital memakai sistem transmisi digital dengan satelit atau yang biasa disebut sebagai siaran TV berlangganan.

TVRI telah melakukan peluncuran siaran televisi digital pertama kali di Indonesia pada 13 Agustus 2008. Pelaksanaan dalam skala yang lebih luas dan melibatkan televisi swasta dapat dilakukan di bulan Maret 2009 dan dipancarkan dari salah satu menara pemancar televisi di Joglo, Jakarta Barat. Sistem penyiaran digital di Indonesia mengadopsi sistem penyiaran video digital standar internasional (DVB) yang dikompresi memakai MPEG-2 dan dipancarkan secara terrestrial (DVB-T) pada kanal UHF (di Jakarta di kanal 40,42,44, 46 UHF) serta berkonsep gratis untuk mengudara. Penerimaan sinyal digital mengharuskan pengguna di rumah untuk menambah kotak konverter hingga pada nantinya berlangsung produksi massal TV digital yang bisa menangkap siaran DVB-T tanpa perlu tambahan kotak konverter.

Di Indonesia Kementerian Kominfo merancang penyelenggaraan televisi digital adalah sebagai berikut: (1) Tahun 2012 seluruh Jawa dan Kepulauan Riau; (2) Tahun 2013 Sumatera Utara dan Kalimantan Timur; (3) Tahun 2014 seluruh Sumatera; (4) Tahun 2015 Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah dan Barat; (5) Tahun 2016 Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara; (6) Tahun Seluruh 2017 Maluku dan Seluruh Papua (Majalah Konvergensi, 2012). Proses migrasi dari TV analog ke TV digital di Indonesia dimulai Tahun 2009, dan telah dilakukan mulai dari proses perizinan dan pengimplementasinya akan dilakukan secara bertahap untuk setiap zona. Direncanakan mulai Tahun 2018, seluruh siaran TV analog akan dimatikan.

Sementara itu *roadmap* migrasi TV analog ke TV digital terbagi atas 3 (tiga) tahap, yaitu: (1) Tahap pertama 2009 -2013 terdiri dari (a) Uji coba lapangan maks. 1 tahun (2009); (b) Perizinan baru untuk TV digital (2010); (c) Moratorium izin baru TV analog (2009-2010); (d) Awal periode *simulcast* (2010-2017); (d) Dukungan industri dalam negeri untuk *Set Top Box* (STB); (2) Tahap Ke-dua 2014-2017 terdiri dari (a) Penghentian (*cut off*) operasi onal TV analog di kota-kota besar (Daerah Ekonomi Maju/DEM); (b) Percepatan izin baru TV digital di Daerah Ekonomi Kurang Maju (DEKM); (d) Periode *simulcast* lanjutan (2010-2017) untuk DEKM; (3) Tahap ke-tiga 2018 terdiri dari (a) Penghentian TV analog secara total di seluruh Indonesia (*fully digital*); (b) Realokasi band V UHF bagian atas (*upper part of band V UHF*) untuk pemanfaatan selain penyiaran (mis:telekomunikasi mobile, dan penanggulangan bencana alam) (Kemkominfo,2011:100).

Rogers (1986, 1-2) memberikan definisi bahwa "*Technology: is a design for instrumental action that reduce the of uncertainty in the cause effect relationship involve in achieving a desired outcome*". Rogers menjelaskan lebih lanjut bahwa teknologi komunikasi adalah perangkat keras, struktur organisasi dan nilai sosial dimana individu mengambil, memproses dan bertukar informasi. Terdapat hal yang khusus dalam difusi teknologi komunikasi : (1) *Critical mass* adopter dari teknologi komunikasi interaktif dibutuhkan untuk kegunaan ide baru agar cukup bagi individu untuk mengadopsi. Kegunaan sistem komunikasi baru meningkatkan seluruh adopter dengan masing-masing adopter tambahan; (2) Media komunikasi baru merupakan *tool technologies* yang merepresentasikan teknik yang dapat diaplikasikan pada berbagai cara dalam berbagai situasi. Teknologi tersebut sebagai *computer-based innovation* yang sering ditandai dengan tingkat *re-invention* yang relatif tinggi; (3) Variabel terikat dalam studi difusi dan media baru lebih pada tingkat penggunaan inovasi daripada sekedar pengambilan keputusan untuk mengadopsi atau mengimplementasikan (Rogers 1986, 121-122).

Dunia penyiaran mengalami perkembangan yang sangat pesat disebabkan antara lain: (1) Inovasi dalam pembuatan peralatan (*devices*), jaringan (*network*) dan pelayanan (*services*); (2) Inovasi tersebut menciptakan model ekonomi baru, bentuk atau kreasi content yang baru; maka hal ini memberikan peluang bagi pemain business yang lebih banyak pada akhirnya memberikan layanan lebih baik, beragam dan menguntungkan bagi konsumen.

Inovasi-inovasi dalam bidang penyiaran menyebabkan peralihan dari analog ke digital dan kemudian juga dari "*broadcast TV*" ke "*broadband TV*". Biasanya dalam komunikasi suatu sinyal sebelum ditransmisikan dimodulasi terlebih dahulu (frekuensi digeser sehingga cocok untuk transmisi), hal ini disebut *broadband*. Bila sinyal tidak dimodulasi terlebih dahulu maka disebut *baseband*. Dikenal 3 (tiga) macam transmisi sinyal *baseband*: (1) Transmisi sinyal analog; (2) Transmisi sinyal Pulsa; dan (3) Transmisi sinyal digital. Transmisi secara digital adalah lebih menguntungkan dari pada transmisi analog, terutama pada pengecilan efek *nois*nya. Walaupun menurut teori informasi transmisi secara digital dapat sama sekali bebas error, tetapi dalam kenyataannya tidaklah semudah itu, mengingat biayanya akan lebih mahal. Parameter yang diperhatikan didalam transmisi digital adalah (1) Kecepatan pengiriman bit (*bit rate*); (2) Keandalan selama transmisi dinyatakan dengan *error rate* (Tjandra Susila, 2009, 62).

Dalam tahun 2011, kemajuan yang sangat pesat dalam bidang penyiaran diperlihatkan dengan antara lain: (1) Pembuatan (produksi) gambar (video) yang telah beralih dari 2 dimensi (2D-TV) menjadi 3 dimensi (3D-TV), hal ini telah didukung tersedianya peralatan camera, Video Switcher, Automation, Server, Editing Sistem dan sebagainya yang sudah siap untuk memproduksi 3D-TV; (2) HYBRID TV (Hbb TV) yang merupakan penggabungan sistem penyiaran linear (Terrestrial, Satellite, Cable) dengan internet TV, sistem ini telah didukung dengan piranti untuk yang sudah siap pakai; (3) Penyempurnaan standar-standar penyiaran untuk dapat mengakomodasi kemajuan teknologi seperti antara lain Sistem DBV-T ke DVB T-2 yang dapat meningkatkan kapasitas jumlah program hampir 50% ketahanan siaran (*robustness*) terhadap derau (*noise*), dan juga fleksibilitas ragam program yang dapat disiarkan dalam satu saluran siaran; dan (4) Dengan telah masuknya 3D-TV dipasaran maka standar "Blue Ray" yang sebelumnya diperkenalkan, terus disempurnakan, termasuk kaca yang sebagai alat bantu atau target yang diharapkan dicapai adalah penonton 3D-TV tanpa kaca, Eropa memprediksi dalam tahun 2015, penggunaan monitor 3D akan meningkat secara eksponensial dari 4.4 juta ditahun 2011 menjadi 629 juta ditahun 2015(Kemkominfo,2011:12-13).

Konsep-Konsep Teoritik

Salah satu teori yang menjelaskan tentang fenomena sikap manusia yaitu *The Social Judgement Theory* dari Muzafer Sherif (Griffin, 2003). Teori yang bekerja dalam tradisi positivistik ini merupakan salah satu teori psikologis yang tergabung dalam psikologi kognitif behavioral. Teori ini menjelaskan tentang fenomena sikap manusia terhadap sesuatu obyek.

Konsep-konsep yang dikemukakan Sherif dalam menjelaskan fenomena sikap terdiri dari : **ego involvement** : dalam bersikap terhadap obyek, individu dipengaruhi oleh keterlibatan ego involvement dalam dirinya, yaitu relevansi individu dengan sesuatu masalah. Relevansi ini misalnya karena faktor-faktor internal seperti nilai-nilai agama, ideologi, atau nilai-nilai tertentu lainnya seperti karena persahabatan, teman sekampung, dls.

Dalam jiwa manusia terdapat wilayah sikap. Dalam struktur wilayah sikap manusia terdapat tiga bentuk sikap yang terdiri dari : *latitude of acceptance* (sikap menerima/setuju) ; *latitude of non commitment* (netral) ; dan *latitude of rejection* (sikap menolak/tidak setuju). Dalam kenyataan sehari-hari, fenomena variasi sikap demikian banyak dijumpai. Misalnya sikap terhadap terbit kembalinya majalah Playboy beberapa waktu lalu di Bali. Pihak FPI menolak keras dan geram melihat terbit kembalinya majalah tersebut. Atau pada fenomena RUUAPP, gerakan kaum perempuan di bawah koordinasi Ratna Sarumpaet menolak keras diundangkannya RUU tersebut. Sementara Pihak FBR atau kelompok Islam lainnya mendukung diundangkannya RUU ini dengan segera. Demikian pula tentunya terkait dengan masalah televisi digital, fenomenanya juga cenderung serupa. Ada yang menolak seperti yang dinyatakan oleh kalangan legislatif dan anggota KPI sebelumnya. Sementara terlihat ada yang justru menerimanya seperti yang terungkap dari pernyataan Subiyakto sebelumnya.

Konsep lain yang berhubungan dengan teori ini adalah kontras dan asimilasi. Kontras atau tentangan dan asimilasi berkaitan dengan ego seseorang dalam bersikap. Pada dasarnya jika suatu pesan relatif dekat dengan posisi seseorang, pesan itu akan diasimilasi, sementara pesan-pesan yang lebih jauh akan ditentang. Contoh asimilasi, misalnya saya tidak suka bepergian keluar rumah bila hari libur, namun karena menghormati teman sekampung yang baru sekali ke Jakarta, yang nota bene kepingin jalan-jalan melihat kota Jakarta, saya terpaksa mengasimilasikan atau meleburkan sikap menolak saya untuk kemudian menemaninya jalan-jalan.

Penelitian ini sendiri akan memakai konsep Sherif sebelumnya untuk menjelaskan fenomena sikap penyelenggara terhadap persoalan televisi digital. Namun demikian penggunaannya hanya sebatas konsep bentuk sikap berupa *latitude of acceptance* (sikap menerima/setuju) ; *latitude of non commitment* (netral) ; dan *latitude of rejection* (sikap menolak/tidak setuju). Dengan demikian penelitian ini tidak menjangkau fenomena sikap sampai kepada konsep kontras dan asimilasi, yakni konsep yang menjelaskan *Why* subyek menerima, netral atau menolak televisi digital.

Batasan Konsep

Sikap adalah reaksi berupa tanggapan atau penilaian individu terhadap penyelenggaraan siaran televisi digital di Indonesia dan khususnya menyangkut wilayah DKI Jakarta. Fenomena sikap akan dilihat dari lima dimensi yaitu : 1) dimensi kendala penyelenggaraan penyiaran televisi digital; 2) potensi penyelenggaraan siaran televisi digital; 3) kesiapan masyarakat dan industri menghadapi migrasi analog ke digital; 4) arah penyelenggaraan siaran televisi digital; dan 5) arah penyelenggaraan penyiaran siaran televisi digital bergerak.

Definisi Operasional

Variabel Mayor Sikap	Variabel Minor Sikap	Indikator
	Dimensi kendala penyelenggaraan penyiaran televisi digital akan dilihat dari sikap responden mengenai	Sarana dan prasarana penyiaran digital membutuhkan investasi yang tinggi (peralatan studio dan transmisi); Implementasi penyiaran digital membutuhkan perangkat tambahan yang saat ini masih langka; Budaya masyarakat Indonesia cenderung resisten terhadap implementasi teknologi baru (penyiaran digital); Kualitas sumber daya manusia belum seluruhnya trampil dalam implementasi teknologi digital; Regulasi bidang penyiaran yang dibuat oleh Pemerintah belum sepenuhnya mendukung pengembangan penyiaran digital.
	Potensi penyelenggaraan siaran televisi digital	Penyiaran digital mempunyai pasar potensial yang sangat menjanjikan; Pemilihan investasi pada penyiaran digital sangat menguntungkan secara keuangan; Aliran kas investasi proyek penyiaran digital dapat menutup biaya investasi yang sudah dikeluarkan; Risiko investasi penyiaran digital relatif rendah; Penyiaran digital dapat meningkatkan akses sosial kemasyarakatan (Network); Budaya masyarakat Indonesia yang mobile/dinamis merupakan potensi penyelenggaraan industri penyiaran digital; Kebutuhan akan tuntutan kualitas produksi yang semakin tinggi dari
		masyarakat; Implementasi penyiaran digital memungkinkan banyaknya jenis layanan (Konvergensi layanan).

	<p>Kesiapan masyarakat dan industri menghadapi migrasi analog ke digital;</p>	<p>Implementasi penyiaran digital merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat; Karakteristik penyiaran digital saat ini telah sesuai dengan keinginan masyarakat; Masyarakat sudah siap secara mental menerima penyiaran digital; Biaya bukan merupakan hal yang dipertimbangkan oleh masyarakat untuk migrasi dari analog ke digital; Masyarakat sudah siap menggunakan teknologi digital tanpa kesulitan yang berarti; Masyarakat dan industri penyiaran belum menguasai benar pengetahuan tentang penyiaran digital.</p>
	<p>Arah penyelenggaraan siaran televisi digital.</p>	<p>Penyelenggaraan penyiaran digital dapat meningkatkan serta memperluas akses informasi bagi masyarakat secara merata di seluruh Indonesia; Penyelenggaraan penyiaran digital dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat; Penyiaran digital dapat memperluas lapangan kerja terutama bidang penyiaran; Penyiaran digital dapat meningkatkan keunggulan kompetitif Indonesia; Penyiaran digital dapat meningkatkan sarana promosi yang efektif bagi Indonesia.</p>
	<p>Arah penyelenggaraan penyiaran siaran televisi digital bergerak</p>	<p>Gaya hidup masyarakat yang semakin mobile pada akhirnya akan membutuhkan layanan penyiaran digital bergerak; Untuk menghadapi perubahan budaya masyarakat yang semakin mobile, industri penyiaran perlu segera mempelajari dan memahami teknik produksi content penyiaran digital bergerak;</p>

		Teknologi penyiaran digital bergerak berbeda dengan teknologi penyiaran tetap tidak bergerak; Industri penyiaran di Indonesia perlu segera mengimplementasikan penyiaran digital bergerak.
--	--	--

Metodologi

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui survey yang bersifat eksploratif yakni membuat deskripsi tentang fenomena sikap penyelenggara terkait siaran televisi digital. Metode survey digunakan untuk mengungkap kesiapan penyelenggara dilihat dari sisi awak media televisi yang akan mengoperasikan siaran televisi digital. Populasi penelitian adalah Stasiun awak media televisi penyiaran di Jakarta. Sampel ditetapkan secara proporsional dari populasi yang tersebar pada Stasiun Televisi Penyiaran : SCTV, DAAI, TRANS 7, ANTV, TVRI Stasiun Jakarta, TVRI Stasiun Nasional, dan Trans TV. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dalam bentuk *convenience sampling*. Metode ini dipilih karena cepat, mudah, murah dan tepat sasaran. Unit analisis penelitian ini adalah individu (awak media). Jumlah kuesioner ditentukan secara kuota sebanyak 100 yang didistribusikan secara berimbang ke tujuh stasiun televisi.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengisi pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang langsung dilakukan oleh responden terpilih dalam kurun waktu selama dua minggu. Teknik pengolahan data dengan menggunakan *software SPSS 12*. Analisis dilakukan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Karakteristik

Berdasarkan hasil proses pengumpulan data, diketahui terdapat sejumlah responden yang tidak memberikan sikapnya terhadap persoalan televisi digital. Artinya, penelitian ini tidak berhasil mendapatkan keterangan mengenai sikap meyangkut televisi digital dari sejumlah responden (34 %) sehubungan mereka tidak menyerahkan kembali kuesioner yang telah mereka terima selama dua minggu itu. Selengkapnya mengenai hasil proses pengumpulan data tersebut disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1
 Responden Yang Bersikap

No	Stasiun Televisi	Responden	Persentase
1.	SCTV	11	11
2.	DAAI	7	7
3.	TRANS 7	8	8
4.	ANTV	10	10
5.	TVRI Stasiun Jakarta	10	10
6.	TVRI Stasiun Nasional	12	12
7.	Trans TV	8	8
	Jumlah	66	66
8.	Tidak kembali	34	34
	Jumlah	100	100

Responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh laki-laki sebanyak 43 responden (65 %) sementara perempuan sejumlah 23 responden (35 %). Berdasarkan pengelompokan usia responden di semua stasiun televisi diketahui usia 25 tahun – 34 tahun sebanyak 22 responden (33 %), 35 tahun – 44 tahun 19 (28,8), 45 tahun – 54 tahun sebanyak 18 (27%), dan 18 tahun – 24 tahun 4 (6,06%) serta di atas 54 tahun sebanyak 3 (4,545).

Mengenai agama yang dianut, maka responden mayoritas sebagai pemeluk agama Islam 48 responden (72,7%), kemudian berturut-turut Kristen Protestan 8 responden (12,0%), Budha 6 responden (9,09 %), Khatolik dan Hindu masing-masing 2 responden (3,03%). Sementara mengenai pendidikan, maka pendidikan terakhir responden mayoritas 42(63,63 %) sebagai Sarjana Strata 1 (S-1). Sisanya yaitu Pasca Sarjana (S-2), Diploma (D-3) dan SLTA masing-masing 8 responden (12,12 %).

Sikap Terhadap Siaran Televisi Digital

Mengenai agama yang dianut, maka responden mayoritas sebagai pemeluk agama Islam 48 responden (72,7%), kemudian berturut-turut Kristen Protestan 8 responden (12,0%), Budha 6 responden (9,09 %), Khatolik dan Hindu masing-masing 2 responden (3,03%). Sementara mengenai pendidikan, maka pendidikan terakhir responden mayoritas (63,63 %) sebagai Sarjana Strata 1 (S-1). Sisanya yaitu Pasca Sarjana (S-2), Diploma (D-3) dan SLTA masing-masing 8 responden (12,12 %). Bagian ini akan memaparkan hasil penelitian menyangkut sikap menurut masing-masing dimensi. Pemaparannya akan dimulai dari sikap responden terkait televisi digital menyangkut dimensi 'kendala penyelenggaraan penyiaran televisi digital' dan akan diakhiri pada dimensi 'penyelenggaraan penyiaran siaran televisi digital bergerak'. Hasilnya sebagai berikut :

Berkaitan dengan dimensi 'kendala penyelenggaraan penyiaran televisi digital', temuan penelitian menunjukkan bahwa bagian terbesar (54,55) responden bersikap setuju mengenai persoalan kendala dimaksud. Cukup banyak juga di antara mereka yang bersikap netral (25,76%). Sementara yang tidak setuju menyangkut persoalan 'kendala' ini, jumlahnya tidak sedikit juga, yakni hampir 20 %. (lihat tabel 2).

Lalu, terkait dengan sikap menyangkut 'potensi penyelenggaraan siaran televisi digital', responden tampaknya juga bagian terbesarnya (43,94%) bersikap setuju. Yang bersikap netral juga cukup banyak jumlahnya (36,35%). Sementara responden yang tidak setuju terkait 'potensi' dimaksud, proporsinya hampir sama dengan fenomena sebelumnya, di mana jumlahnya mencapai 20 %. (lihat tabel 3).

Menyangkut sikap mereka terkait 'kesiapan masyarakat dan industri menghadapi migrasi analog ke digital', temuan menunjukkan gejala berbeda dengan dua fenomena sebelumnya, di mana dalam hal ini ternyata responden lebih banyak yang bersikap netral (36,36 %). Namun demikian tidak jauh pautannya dengan responden yang bersikap setuju yang proporsinya sebesar 34,85%. Sementara kalangan responden yang tidak setuju, pada persoalan ini jumlahnya meningkat menjadi 28,79 %. (lihat tabel 4).

Mengenai 'arah penyelenggaraan siaran televisi digital' kalangan responden terlihat lebih dominan yang setuju (66,66%). Sementara mereka yang netral jumlahnya 21,21 dan tidak setuju 12,12 %. (lihat tabel 5).

Terakhir yaitu menyangkut sikap tentang 'arah penyelenggaraan penyiaran siaran televisi digital bergerak', responden kebanyakan setuju (57,57%) mengenai hal ini. Relatif sedikit tampaknya pada kalangan mereka yang tidak setuju (18,19%). Sementara mereka yang netral jumlahnya mencapai jumlah yang cukup lumayan, yakni 25,76 %.

Diskusi

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa sikap responden bervariasi terhadap masalah penyiaran televisi digital. Di antara mereka ada yang setuju, netral dan tidak setuju. Namun, dari lima dimensi sikap menyangkut penyelenggaraan siaran televisi digital, sikap responden cenderung lebih banyak setuju pada empat dimensi, yaitu dimensi : kendala penyelenggaraan penyiaran televisi digital; potensi

penyelenggaraan siaran televisi digital; arah penyelenggaraan penyiaran siaran televisi digital bergerak; penyelenggaraan siaran televisi digital; dan penyelenggaraan penyiaran siaran televisi digital bergerak. Sementara menyangkut sikap terkait dimensi 'kesiapan masyarakat dan industri menghadapi migrasi analog ke digital' responden lebih banyak bersikap netral. Sementara yang setuju sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan yang tidak setuju.

Temuan ini tentunya berbeda dengan gejala awal yang muncul melalui saluran lain seperti internet dan media konvensional sebagaimana dikutip pada bagian latar belakang penelitian ini. Pada moment itu tampak bahwa sikap yang muncul pada sejumlah nara sumber (elit) yaitu antara yang setuju dengan penyelenggaraan penyiaran televisi digital (Subiakto) dan yang tidak setuju (legislatif dan pihak KPI). Sementara yang bersikap netral tidak tampak waktu itu.

Dengan membandingkan sikap-sikap individu masyarakat baik pada level elit dan level penyelenggara siaran televisi sebelumnya, kiranya itu menegaskan kembali tentang kebenaran asumsi Sheriff mengenai sikap melalui *The Social Judgement Theory*-nya, bahwa manusia itu memiliki tiga kemungkinan bentuk sikap dalam menyikapi suatu obyek itu. Mengenai ke arah mana suatu sikap dibentuk, ini menurut Sheriff berkaitan dengan faktor Kontras dan asimilasi yang ada pada individu. Baik Kontras atau tentangan dan asimilasi itu, berkaitan dengan ego seseorang dalam bersikap. Meskipun penelitian ini tidak sampai menjangkau persoalan tersebut, namun terutama terkait dengan faktor kontras yang nota bene mewujudkan sikap *tidak setuju* dalam riset ini, varian kekontrasan itu bisa jadi didasarkan oleh kepentingan bisnis, sempitnya horizon tentang televisi digital, dan minimnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

PENUTUP

Penelitian ini berusaha menjawab permasalahan mengenai sikap penyelenggara siaran televisi terhadap penyelenggaraan siaran televisi digital. Dari hasil analisis data survai, penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap responden bervariasi terhadap masalah peyiaran televisi digital. Di antara mereka ada yang setuju, netral dan tidak setuju. Namun, dari lima dimensi sikap menyangkut penyelenggaraan siaran televisi digital, sikap responden cenderung lebih banyak setuju pada empat dimensi, yaitu dimensi : kendala penyelenggaraan penyiaran televisi digital; potensi penyelenggaraan siaran televisi digital; arah penyelenggaraan siaran televisi digital; dan arah penyelenggaraan penyiaran siaran televisi digital bergerak. Menyangkut sikap terkait dimensi 'kesiapan masyarakat dan industri menghadapi migrasi analog ke digital' responden lebih banyak bersikap netral. Sementara yang setuju sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan yang tidak setuju.

Daftar Pustaka

- Balitbang SDM, Kominfo dan Galih Karsa Utama. 2011. *Studi tentang Prospek Broadcasting TV Digital*. Kemkominfo. *Komunikasi dan Informatika Indonesia, Buku Putih*..
- Griffin, EM. 2003. *A First Look At Communication Theory, Fifth edition*, New York, Mc Graw Hill.
- KPI. "Peraturan TV Digital Cacat Hukum", dalam : <http://industri.kontan.co.id/news/kpi-peraturan-tv-digital-cacat-hukum>, diakses 5 November 2013.
- Pusat Informasi dan Humas, Kominfo. 2012. *Majalah Laporan Khusus Konvergensi*, Edisi III.
- Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Balitbang SDM. 2012. Laporan Penelitian Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran. "Prospek Penyelenggaraan Industri Penyiaran Digital di Lima Kota di Indonesia".
- Rogers, Everett, M. 1986. *Communication Technology: The New Media in Society*. New York: The Free Press.
- Subiakto, Henry. "Tv Digital Dan Demokrasi Penyiaran" dalam <http://henrysubiakto.blogspot.com/2012/04/tv-digital-dan-demokrasi-penyiaran.html>, diakses 5 November 2013.
- Susila, Tjandra. 2009. *Komunikasi Digital*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- "KPI : Peraturan TV digital cacat hukum" .. (<http://industri.kontan.co.id/news/kpi-peraturan-tv-digital-cacat-hukum>)

LAMPIRAN

Tabel 2
Responden Menurut Sikap Terhadap kendala penyelenggaraan penyiaran televisi digital
n 66

Bentuk Sikap	f	%
Setuju	36	54,55
Netral	17	25,76
Tidak Setuju	13	19,70
Jumlah	66	100,01

Tabel 3
Responden Menurut Sikap Terhadap potensi penyelenggaraan siaran televisi digital
n 66

Bentuk Sikap	f	%
Setuju	29	43,94
Netral	24	36,35
Tidak Setuju	13	19,71
Jumlah	66	100,00

Tabel 4
Responden Menurut Sikap Terhadap kesiapan masyarakat dan industri
menghadapi migrasi analog ke digital
n 66

Bentuk Sikap	f	%
Setuju	23	34,85
Netral	24	36,36
Tidak Setuju	19	28,79
Jumlah	66	100,00

Tabel 5
Responden Menurut Sikap Terhadap arah penyelenggaraan siaran televisi digital
n 66

Bentuk Sikap	f	%
Setuju	44	66,66
Netral	14	21,21
Tidak Setuju	8	12,12
Jumlah	66	100,00

Tabel 6
Responden Menurut Sikap arah penyelenggaraan penyiaran siaran televisi digital bergerak
n 66

Bentuk Sikap	f	%
Setuju	38	57,57
Netral	16	24,24
Tidak Setuju	12	18,19
Jumlah	66	100,00

ANALISIS CDA NORMAN FAIRCLOUGH

Dalam prosesnya, penelitian dengan menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough memiliki tahapan-tahapan. Tahapan **besar** analisis Norman Fairclough terdiri dari

- 1) **Tahap : peristiwa komunikatif** (*communicative events*)
- 2) **Tahap : prosedur atau urutan wacana** (*the order of discourse*)

Tahap 1 : Peristiwa komunikatif (*communicative events*):

Pada tahap ini meliputi :

1. **Analisis teks**, tujuannya untuk mengungkap makna dan dilakukan dengan menganalisis bahasa secara kritis. Dilakukan dengan cara menemukan unsur-unsur *representasi, relasi, dan identitas*. *Representasi* mengandung makna bahwa yang ingin dilihat dalam suatu teks (baca : nasionalisme) yaitu : bagaimana peristiwa, orang, kelompok, situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan dan digambarkan dalam teks. *Relasi*, maka yang ingin dilihat dalam suatu teks (baca : nasionalisme) yaitu : bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks. *Identitas*, maka yang ingin dilihat yaitu : bagaimana identitas wartawan, khalayak dan partisipan berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks.
2. **Discourse practice (praktek wacana) :**
Dilakukan pada level proses pembuatan teks (*processing analysis*). Ini berguna untuk melakukan penafsiran atas teks dan analisis konsumsi teks. Dalam tahapan ini Fairclough melihat bagaimana praktik **produksi teks (di pihak media)** dan **konsumsi teks (di pihak khalayak)**. Analisis praktik produksi teks melihat dari sisi *individu wartawan, hubungan antara wartawan dan struktur organisasi media* serta *praktik kerja/rutinitas kerja*. Sementara itu analisis pada praktik konsumsi (di pihak khalayak) melihat bagaimana terpaan *teks media* dikonsumsi pada tataran khalayak dan bagaimana terpaan teks media mempengaruhi persepsi audiensnya.
- 3) **Sociocultural practice**. adalah analisis pada level sosial (*social analysis*) yang berisikan kajian mengenai keadaan sosial yang mempengaruhi proses pembuatan teks guna menjelaskan konteks lahirnya sebuah teks. Guna memudahkan proses analisis, Fairclough membuat tiga level analisis pada tahapan *Sociocultural practice* ini, yaitu level situasional, institusional dan sosial. **Level situasional** yaitu suatu level yang berupaya melihat bagaimana waktu atau suasana mikro ketika teks dilahirkan. Atau, konteks peristiwa saat teks berita dibuat. **Level institusional** yaitu level yang berusaha melihat bagaimana pengaruh institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Institusi ini bisa berasal dari dalam diri media sendiri dan bisa dari kekuatan-kekuatan eksternal yang menentukan proses produksi berita. Faktor institusi yang penting adalah institusi yang berhubungan dengan ekonomi media karena produksi berita di media kini sulit dilepaskan dari pengaruh ekonomi media yang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap wacana yang muncul dalam pemberitaan. Sejumlah institusi berpengaruh dimaksud yaitu pengiklan, khalayak pembaca, persaingan antar media, pemilik modal atau kepemilikan terhadap media; institusi politik (negara maupun kekuatan-kekuatan politik lainnya). **Level sosial** yaitu suatu level yang lebih melihat pada aspek makro dalam kaitan kelahiran suatu teks seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau sistem budaya masyarakat secara keseluruhan.

Catatan : **Order of discourse** : Bentuk *setting* komunikasi (Koran : artikel; berita; tajuk ; dll).

Disajikan Hasyim Ali Imran dari sumber : Fairclough, Norman, 1995, *Media Discourse, Voices Intertextuality*; Fairclough, Norman, 1995, *Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language*, London and New York, Longman, p.76.